

Reformasi DMO–DPO: Memperkuat Tata Kelola dan Menjamin Keadilan dalam Transisi Energi Indonesia

Meliana Lumbantoruan

“Brown to Green Conference”

3 December 2025

Kuota Produksi & DMO/DPO

KEBUTUHAN DOMESTIK
(PLN, Industri, Ketahanan Energi Nasional)

DMO (Volume)
Kewajiban Pasok

Menentukan berapa volume dari kuota produksi
harus dialokasikan ke domestik

KUOTA PRODUKSI NASIONAL BATUBARA

- Menjadi dasar suplai untuk DMO
- Menentukan porsi ekspor
- Sumber kompensasi terhadap DPO

Jika kuota tidak ditambah:

- Volume ekspor berkurang
- Potensi shortage DMO

DPO (Harga)
Harga Domestik

Harga domestik lebih rendah dari ekspor

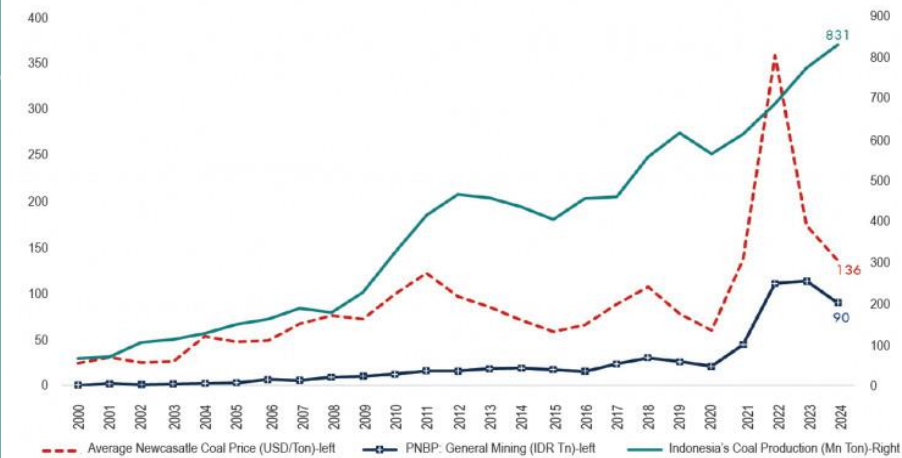
Mengurangi profit perusahaan

- Mendorong negosiasi kenaikan kuota produksi
- Insentif produksi tidak sejalan dgn kebutuhan transisi

Risiko Tata Kelola dalam DMO/DPO

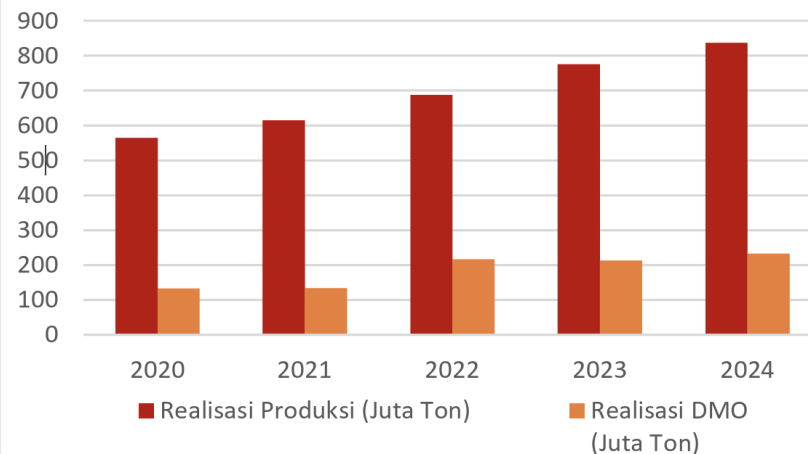
- **Volatilitas harga pasar:** PNBP minerba menurun sejak 2022
- **Penurunan permintaan global:** ekspor turun 12% (2025), China-India mulai transisi
- **Risiko stranded assets** semakin nyata di pasar global
- **Realisasi produksi batubara** tahun 2024 sebesar 836,13 juta ton (117,76%) dari target 710 juta ton

Coal prices, production and Indonesia's nontax state revenue (PNBP)



Source: Finance Ministry, Energy and Mineral Resources Ministry and Bloomberg

Produksi Batubara terhadap DMO



Risiko Tata Kelola dalam DMO/DPO

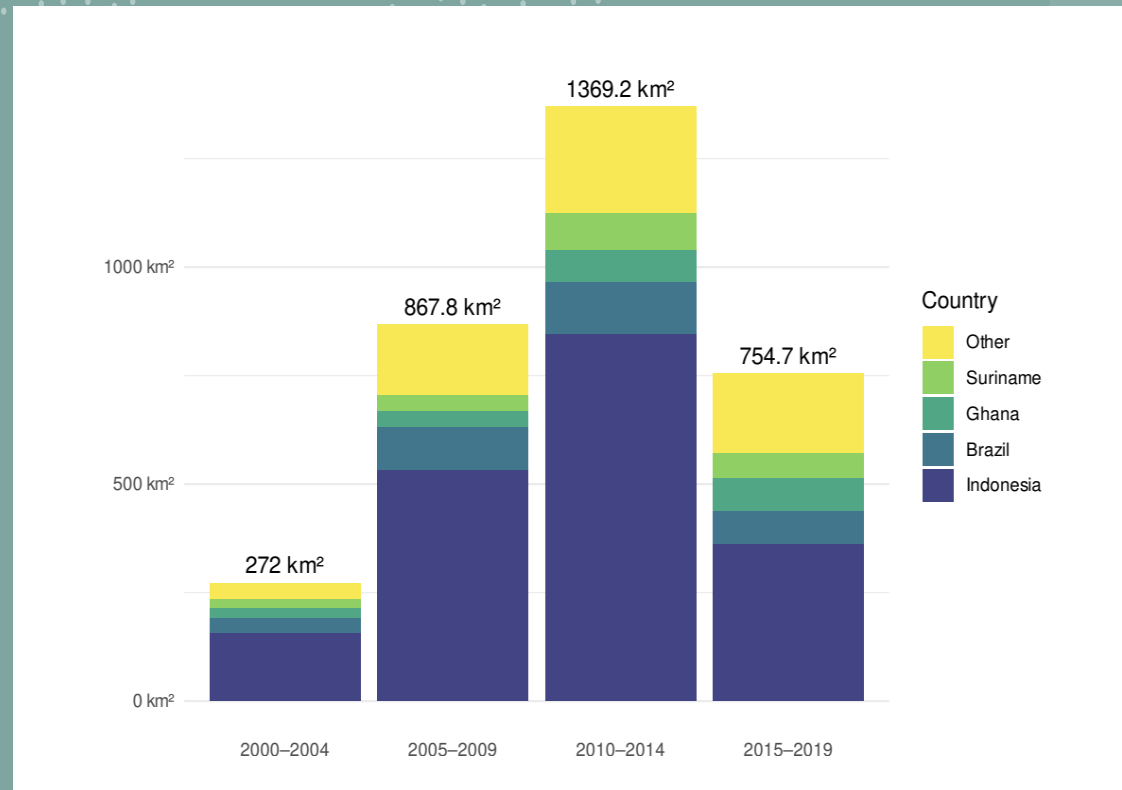
- Pemenuhan **DMO batubara didominasi** penyerapannya dari **PLTU (57%)**, Smelter (30%), Semen (4%), Kertas (3%), dan Industri lainnya (6%).
- Realisasi DMO PLN **± 120 juta ton/tahun**, tetapi **detail per perusahaan tidak dipublikasikan**.
- **Rent-seeking akibat perbedaan harga**: DPO US\$70/ton vs harga pasar US\$180–300/ton.
- **Rasio inspektur tambang dengan total IUP tidak proporsional (160 sd 200 orang untuk 4.250 IUP)**
- Revisi RKAB cenderung naik **lebih dari 20%** setiap tahun.

Dampak Sosial- Ekonomi Reformasi DMO/DPO

- **Ketergantungan fiskal daerah tinggi:**
DBH & PNBP batubara berkontribusi hingga **30-50% APBD** (Kutai Kartanegara, Paser, Muara Enim, Sawahlunto)
- **Dampak sosial tenaga kerja:** setiap penurunan **100 juta ton produksi = 8.500-10.000 pekerja** berisiko kehilangan pendapatan.
- **Kerentanan ekonomi masyarakat:** 950 ribu ha lebih kawasan hutan rusak akibat tambang.
- **Diperlukan Dana Transisi:** minimum 1-1,5% PNBP minerba dialihkan untuk reskilling & diversifikasi.
- **Tambang ditutup = dampak ekonomi langsung:** 70% desa tambang tidak memiliki alternatif ekonomi

Dampak Sosial- Ekonomi Reformasi DMO/DPO

- **Dampak lingkungan ekstrim:** Mengalami kehilangan **950 ribu ha hutan tropis terbesar** akibat pertambangan (2000-2019)
- Dampak sosial serius: **konflik, hilang mata pencaharian, 168+ korban jiwa dari lubang tambang**
- Pengendalian produksi dapat kurangi beban lingkungan dan fokus pada redistribusi manfaat yang lebih adil



Grafik perbandingan tingkat hilangnya hutan tropis akibat pertambangan skala industri dari tahun 2000 hingga 2019. Sumber: Giljum et al., 2022

Agenda Reformasi Tata Kelola: Melakukan Pengendalian produksi Batubara untuk transisi energi yang berkeadilan

Jangka pendek (Kelembagaan)

- Masukkan target pengurangan produksi terukur dalam revisi RUEN
- Turunkan target RPJMN 2025-2029 selaras dengan komitmen iklim
- Integrasikan pengendalian produksi dengan pensiun dini PLTU dalam RUPTL
- Perketat persetujuan RKAB dengan kajian dampak lingkungan dan risiko fiskal komprehensif

Jangka Menengah (Transisi Ekonomi)

- Implementasi kuota berbasis revisi UU Minerba dengan transparansi dan inklusi
- Program transisi berkeadilan untuk mengantisipasi dampak sosial di daerah tambang
- Reformasi kebijakan DMO: penuhi kebutuhan domestik tanpa ekspansi
- Maksimalkan investasi energi terbarukan sebagai sumber penerimaan baru

Jangka Panjang (Diversifikasi)

- Hentikan ekspansi tambang batubara baru
- Prioritaskan pengembangan energi terbarukan dalam bauran energi nasional
- Digitalisasi perizinan dan penegakan hukum di sektor pertambangan

Agenda Reformasi Tata Kelola

- **Transparansi Alokasi DMO Perusahaan (kuota DMO per perusahaan, realisasi bulanan, jenis kontrak, dan volume ke PLN/industry & Integrasi dengan dashboard publik di MODI/MOMI)**
- Reformasi RKAB untuk Mengendalikan Produksi dengan **membatasi revisi RKAB maksimal 5%-10%** kecuali kondisi force majeure.
- RKAB harus sinkron dengan **kenaikan EBT & penurunan kebutuhan batubara**.
- Seluruh perizinan RKAB, alokasi DMO, dan kebijakan produksi harus disesuaikan dengan: **KEN (PP 40/2025)** yang menargetkan pengendalian produksi; **RUPTL 2025-2034** yang mengurangi porsi PLTU & menaikkan EBT menjadi **74%**; **JETP** yang menargetkan **peak PLTU 2030**, sehingga **DMO/DPO harus menjadi mekanisme transisi, bukan permanen**.
- **Pengawasan multistakeholder: KPK, Ombudsman, CSO, akademisi, pemda.**

“Reformasi DMO dan DPO bukan soal menghapus proteksi, melainkan merestrukturisasi instrumen agar menjadi alat transisi yang aman untuk pasokan, adil untuk publik, dan memacu investasi bersih.

Itu memerlukan roadmap time-bound, pricing yang market-responsive, proteksi sosial-fiskal lintas kementerian, dan penguatan tata kelola yang transparan.”

TERIMA KASIH

Publish 
What You Pay
INDONESIA

 a member of the
RESOURCE JUSTICE
NETWORK

Jl. Kalibata Timur Raya No.86,
Kalibata, Kec. Pancoran,
Kota Jakarta Selatan,
Jakarta 12740

021-38815077
sekretariat@pwypindonesia.org
www.pwypindonesia.org

